

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAKTIFAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN KRAMA BADUNG SEHAT DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG

I Putu Dedy Kastama Hardy¹, Ni Putu Seniasih², Ni Luh Gede Ari Natalia Yudha³
Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan, Sains Dan Teknologi
Universitas Dhyana Pura
Email : dedykastama@undhirabali.ac.id

ABSTRAK

Penonaktifan kepesertaan jaminan kesehatan KBS disebabkan karena adanya sanding data dari dinas terkait lintas sektoral. Dengan adanya sanding data tersebut mengakibatkan lebih dari 40.000 kartu peserta jaminan kesehatan KBS (PBI APBD) tidak aktif. Kepesertaan KBS yang dinon-aktifkan diantaranya karena adanya peserta yang sudah meninggal, adanya peserta yang menikah ke luar Daerah Badung dan adanya peserta yang sudah mendapatkan tanggungan dari tempat kerja atau memiliki tanggungan ganda. Namun dari empat puluh ribuan kepesertaan yang tidak aktif tersebut tidak semuanya disebabkan karena ketiga alasan tersebut di atas, sehingga dari empat puluh ribuan peserta yang kepesertaannya dinon-aktifkan, datang kembali untuk mengaktifkan kepesertaan jaminan kesehatan KBS yang mereka miliki sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS) di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung tahun 2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan *Cross sectional*. Sampel penelitian berjumlah 200 orang yang diambil dengan teknik *purposive sampling*. Analisis Bivariat menggunakan uji *chi square* $\leq 0,05$. Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan hasil bahwa adanya hubungan yang signifikan antara pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, pendapatan, peraturan syarat kepesertaan, kemampuan membayar iuran, kemauan membayar iuran terhadap pengaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Kesimpulan adanya hubungan yang signifikan antara adanya hubungan yang signifikan antara pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, pendapatan, peraturan syarat kepesertaan, kemampuan membayar iuran, kemauan membayar iuran terhadap pengaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.

Kata Kunci : Kesehatan, Krama, Badung, Jaminan Kesehatan

ABSTRACT

The deactivation of KBS health insurance participation is due to data matching from related/cross-sectoral agencies. With this data pairing, more than 40,000 KBS health insurance participant cards (PBI APBD) are inactive. The KBS membership that was deactivated was due to the presence of participants who had died, the presence of participants who married outside the Badung area and the presence of participants who had received dependents from the workplace or had multiple dependents. However, of the forty thousand inactive participants, not all of them were due to the three reasons mentioned above, so that of the forty thousand participants whose membership was deactivated, they came back to activate their previous KBS health insurance membership. This study aims to determine the factors that influence the activation of the Badung Sehat Krama Health Insurance (KBS) membership at the Badung District Health Office in 2021. This type of research is a quantitative research with a cross sectional design. The research sample amounted to 200 people who were taken by purposive sampling technique. Bivariate analysis using chi square test 0.05. Based on the results of the study, it was found that there was a significant relationship between education, knowledge, occupation, income, membership requirements regulations, ability to pay contributions, willingness to pay dues on the activation of the Badung Sehat Krama Health Insurance membership at the Badung Regency Health Office. The results obtained, it is concluded that there is a significant relationship between the existence of a significant relationship between education, knowledge, employment, income, membership requirements regulations, ability to pay contributions, willingness to pay dues on the activation of the Badung Sehat Krama Health Insurance membership at the Badung Regency Health Office.

Keywords: Health, Krama Health, Badung Regency, Health Insurance

PENDAHULUAN

Kesehatan yang merupakan salah satu kebutuhan primer manusia untuk menjalankan fungsi hidup dan peranannya untuk memperoleh kesejahteraan, maka pemerintah harus dapat memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat. Untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal, maka pemerintah Indonesia telah mengupayakan suatu program jaminan kesehatan nasional dimana setiap orang berkewajiban turut serta dalam program tersebut untuk mencapai UHC (*Uneversal Health Coverage*). Jaminan kesehatan nasional yang diupayakan oleh Pemerintah Indonesia adalah JKN-KIS yaitu jaminan berupa perlindungan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional, agar peserta JKN-KIS memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar atau iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

JKN-KIS yang telah diluncurkan Pemerintah Indonesia sejak tahun 2013 hingga saat ini masih memiliki beberapa masalah serta kendala dalam pelaksanaan atau operasionalnya yang terkait dengan syarat kepesertaan, portabilitas layanan, regional rujukan, serta beban pembiayaan. Presiden Republik Indonesia menerbitkan Inpres Nomor 8 Tahun 2017 tentang optimalisasi pelaksanaan program JKN di Indonesia. Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintahan Daerah, memberikan biaya jaminan kesehatan bagi mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak memiliki asuransi kesehatan melalui anggaran pendapatan Nasional (APBN) yang disebut dengan PBI APBN dan yang mendapatkan tanggungan dari pendapatan daerah disebut dengan PBI APBD (Dinkes Kab. Badung, 2019).

Pemerintah Kabupaten Badung sejak tahun 2016 telah meluncurkan jaminan kesehatan Krama Badung Sehat (KBS) dan telah dilaksanakan sejak tahun 2017 untuk membantu masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan di Daerah Kabupaten Badung. Tujuan dari implementasi program Krama Badung Sehat (KBS) ini adalah untuk mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) di Kabupaten Badung. KBS dikelola sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Bupati Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbup Nomor 73 Tahun 2016 tentang program KBS. Penyelenggaraan program KBS ini merupakan amanat dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Sugianto, 2019).

Pelaksanaan dan implementasi program KBS sejak tahun 2017 masih memiliki beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat Badung mengenai jaminan kesehatan Krama Badung Sehat (KBS), dan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh LP2M UNUD tentang “Implementasi Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS) di Kabupaten Badung” didapatkan bahwa aspek interpretasi kebijakan program KBS yang kurang baik. Penon-aktifan kepesertaan jaminan kesehatan KBS disebabkan karena adanya sanding data dari dinas terkait/ lintas sectoral. Dengan adanya sanding data tersebut mengakibatkan lebih dari 40.000 kartu peserta jaminan kesehatan KBS (PBI APBD) tidak aktif. Mereka yang kartu jaminan kesehatan KBS-nya dinonaktifkan, datang kembali ke Dinas Kesehatan Kabupaten Badung untuk mengaktifkan kepesertaannya sehingga dari bulan April sampai saat ini berangsur-angsur kepesertaannya bertambah kembali (Dinkes Kab. Badung, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kuantitatif dengan rancangan *cross sectional*. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, bulan April sampai Mei 2021. Teknik sampling secara *Non Probability Sampling*. Penelitian ini menggunakan Accidental Sampling yaitu peneliti mengambil sampel yang kebetulan ditemui pada saat penelitian, jumlah sampel 200 orang. Pengumpulan data menggunakan kuisioner dengan dengam skala Guttman. Analisa data menggunakan *Chi Square*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Tabel 1. Karakteristik Responden Kepesertaan Jaminan kesehatan Krama Badung Sehat di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Karakteristik	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
Jenis Kelamin:		
Laki-laki	93	46,5
Perempuan	107	53,5
Usia Responden:		
< 30 Tahun	73	36,5
31-40 Tahun	62	31,0
> 41 Tahun	65	32,5

Sebagian besar perempuan sebanyak 107 orang (53,5%) dan sisanya responden laki-laki sebanyak 93 orang (46,5%). Usia responden dibawah 30 tahun sebanyak 73 orang (36,5%), usia responden antara 31-40 tahun sebanyak 62 orang

(31,0%) dan usia responden diatas 41 Tahun sebanyak 65 orang (32,5%).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengaktifan kepesertaan jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Distribusi pendidikan responden dalam pengaktifan kepesertaan jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dibagi menjadi dua kategori yaitu tinggi dan rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dari 200 responden sebanyak 98 orang (49,0%) memiliki pendidikan tinggi dan sebanyak 102 orang (51,0%) memiliki pendidikan rendah.

Tabel 2 Distribusi Responden Menurut faktor-faktor yang mempengaruhi pengaktifan kepesertaan jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

No	Distribusi	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	Pendidikan Tinggi	98	49,0
	Rendah	102	51,0
	Jumlah	200	100
2	Pengetahuan Baik	97	48,5
	Kurang	103	51,5
	Jumlah	200	100
3	Pekerjaan Formal	98	49,0
	Informal	102	51,0
	Jumlah	200	100
4	Pendapatan Tinggi	38	19,0
	Menengah	66	33,0
	Rendah	96	48,0
	Jumlah	200	100

5	Peraturan syarat kepesertaan jaminan kesehatan KBS Mudah	90	45,0
	Susah	110	55,0
	Jumlah	200	100
6	Kemampuan membayar iuran Mampu	81	40,5
	Tidak mampu	119	59,5
	Jumlah	200	100
7	Kemauan membayar iuran Bersedia	84	42,0
	Tidak bersedia	116	58,0
	Jumlah	200	100
8	Pengaktifan Kepesertaan Jaminan Kesehatan KBS Aktif Kembali	90	45,0
	Peserta Baru	110	55,0
	Jumlah	200	100

Sebagian besar responden berpendidikan rendah 51%, lebih banyak responden pengetahuannya kurang 51,5%, 51% pekerjaan informal, yang menggap peraturan dan syarat kepesertaan jaminan kesehatan KBS susah sebanyak 55%, sebanyak 59,5% responden tidak mampu membayar iuran, responden yang tidak bersedia membayar iuran 58% dan sebanyak 55% merupakan peserta baru.

Pengaruh Pendidikan, Pengetahuan, Pekerjaan, Pendapatan dan Praturan syarat Kepesertaan Terhadap Pengaktifan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Tabel 3. Pengaruh Pendidikan, Pengetahuan, Pekerjaan, Pendapatan dan Praturan Syarat Kepesertaan Terhadap Pengaktifan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

	Aktif Kembali		Peserta Baru		Jumlah		CI 95%
	N	%	N	%	N	%	
Pendidikan							
Tinggi	55	56,1	43	43,9	98	100	L=1,383
Rendah	35	34,3	67	65,7	102	100	U=4,335
Jumlah	90	45,0	110	55,0	200	100	
Pengetahuan							
Baik	55	56,7	42	43,3	97	100	L=1,435
Kurang	35	34,0	68	66,0	103	100	U=4,509
Jumlah	90	45,0	110	55,0	200	100	
Pekerjaan							
Formal	56	57,1	42	42,9	98	100	L=1,502
Informal	34	33,3	68	66,7	102	100	U=4,735

Jumlah	90	45,0	110	55,0	200	100	
Pendapatan							
Tinggi	20	52,6	18	47,4	38	100	L=1,277
Menengah	30	45,5	36	54,5	66	100	U=1,327
Rendah	40	41,7	56	58,3	96	100	
Jumlah	90	45,0	110	55,0	200	100	
Peraturan syarat kepesertaan							
Mudah	46	51,1	44	48,9	90	100	L=0,894
Susah	44	40,0	66	60,0	110	100	U=2,752
Jumlah	90	45,0	110	55,0	200	100	

Hasil analisis statistik dengan mempergunakan uji *Chi – Square* diperoleh nilai P sebesar $0.002 < 0.05$ maka dapat disimpulkan adanya pengaruh yang signifikan antara pendidikan terhadap pengaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Hidayat (2015), pendidikan menuntut manusia untuk berbuat dan mengisi kehidupannya yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi sehingga meningkatkan kualitas hidup. Pemerintah Kabupaten Badung sejak tahun 2016 telah meluncurkan jaminan kesehatan Krama Badung Sehat (KBS) dan telah dilaksanakan sejak tahun 2017 untuk membantu masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan di Daerah Kabupaten Badung.

Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap asuransi kesehatan. Suhardi (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemauan masyarakat menjadi peserta JKN dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, keyakinan tentang JKN, dukungan keluarga, dan dukungan tokoh masyarakat. Lubis (2016) dalam penelitiannya menunjukkan ada pengaruh penghindaran risiko, harga asuransi dan pendapatan masyarakat terhadap kepesertaannya dalam program jaminan kesehatan. Pangestika, dkk (2017) mengatakan adanya pengaruh pendidikan terhadap kepesertaan BPJS

Analisis statistik pada variabel pengetahuan dengan mempergunakan uji *Chi – Square* diperoleh nilai nilai P sebesar $0.001 < 0.05$ maka dapat disimpulkan adanya pengaruh yang signifikan antara pengetahuan terhadap pengaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Pengetahuan adalah hasil dari tahu manusia setelah melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu dimana penginderaan tersebut sebagian besar diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2014). Pemerintah Kabupaten Badung sejak tahun 2016 telah meluncurkan jaminan kesehatan Krama Badung Sehat (KBS)

dan telah dilaksanakan sejak tahun 2017 untuk membantu masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan di Daerah Kabupaten Badung.

Rhoza, dkk (2016) mengatakan ada hubungan pengetahuan dengan kepesertaan JKN dimana hasil uji *Chi-Square* menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara faktor internal yaitu pengetahuan ($p = 0,000$) dengan pengambilan keputusan dalam kepesertaan JKN. Suhardi (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemauan masyarakat menjadi peserta JKN dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, keyakinan tentang JKN, dukungan keluarga, dan dukungan tokoh masyarakat. Lubis (2016) dalam penelitiannya menunjukkan ada pengaruh penghindaran risiko, harga asuransi dan pendapatan masyarakat terhadap kepesertaannya dalam program jaminan kesehatan.

Analisis statistik pada variabel pekerjaan dengan mempergunakan uji *Chi – Square* diperoleh nilai P sebesar $0.001 < 0.05$ maka dapat disimpulkan adanya pengaruh yang signifikan antara pekerjaan terhadap pengaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Pekerjaan adalah kebutuhan yang harus dilakukan untuk menunjang kebutuhan diri dan keluarga (Thomas 2007 dalam Nursalam, 2011). Pemerintah Kabupaten Badung sejak tahun 2016 telah meluncurkan jaminan kesehatan Krama Badung Sehat (KBS) dan telah dilaksanakan sejak tahun 2017 untuk membantu masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan di Daerah Kabupaten Badung. Masyarakat yang mempunyai kemauan untuk membayar premi kemungkinan besar mengikuti jaminan kesehatan Krama Badung Sehat (KBS), dan masyarakat yang tidak memiliki kemauan untuk membayar premi cenderung tidak mengikuti jaminan kesehatan Krama Badung Sehat (KBS). Kemauan membayar untuk membayar premi jaminan kesehatan Krama Badung Sehat (KBS) berdasarkan konsep teori dipengaruhi oleh harga barang dan pemanfaatan pelayanan kesehatan.

Hasil penelitian Nadiyah dan Lusiana (2017) menunjukkan sangat sedikit pekerja mandiri yang memutuskan menjadi peserta JKN. Perluasan kepesertaan JKN membutuhkan peran lintas sektor. Lubis (2016) dalam penelitiannya menunjukkan ada pengaruh penghindaran risiko, harga asuransi dan pendapatan masyarakat terhadap kepesertaannya dalam program jaminan kesehatan. Rhoza, dkk (2016) mengatakan ada hubungan pekerjaan dengan kepesertaan JKN dimana hasil uji Chi-Square menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara faktor internal yaitu pengetahuan ($p = 0,000$) dengan pengambilan keputusan dalam kepesertaan JKN.

Analisis statistik pada variabel pendapatan dengan mempergunakan uji *Chi – Square* diperoleh nilai P sebesar $0.014 < 0.05$ maka dapat disimpulkan adanya pengaruh yang signifikan antara pendapatan terhadap pengaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Pendapatan adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga, dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pension (Reksoprayitno, 2012). Pemerintah Kabupaten Badung sejak tahun 2016 telah meluncurkan jaminan kesehatan Krama Badung Sehat (KBS) dan telah dilaksanakan sejak tahun 2017 untuk membantu masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan di Daerah Kabupaten Badung.

Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap asuransi kesehatan. Laila, dkk (2020) mengatakan bahwa Besarnya penghasilan yang diterima oleh seseorang akan mempengaruhi kemauan seseorang untuk mendaftar menjadi peserta asuransi kesehatan. Masyarakat yang mempunyai pendapatan yang lebih lebih tinggi, memutuskan menjadi peserta JKN karena mereka yang mempunyai penghasilan yang cukup akan mempertimbangkan dengan baik untuk mengikuti JKN. Suhardi (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemauan masyarakat menjadi

peserta JKN dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, keyakinan tentang JKN, dukungan keluarga, dan dukungan tokoh masyarakat. Pangestika, dkk (2017) mengatakan adanya pengaruh pendapatan terhadap kepesertaan BPJS.

Analisis statistik pada variabel peraturan syarat kepesertaan dengan mempergunakan uji *Chi – Square* diperoleh nilai P sebesar $0.016 < 0.05$ maka dapat disimpulkan adanya pengaruh yang signifikan antara peraturan syarat kepesertaan terhadap pengaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Ketidakikutsertaan jaminan kesehatan Krama Badung Sehat (KBS) dipengaruhi juga oleh peraturan pemerintah yang mudah di mengerti masyarakat. Asumsi peneliti meskipun peraturan pemerintah sangat mudah namun apabila masyarakat belum mampu mencerna informasi maka masyarakat tidak mengikuti jaminan kesehatan Krama Badung Sehat (KBS).

Sastradimulya, dkk (2014) mengatakan kemudahan peraturan pemerintah mengenai jaminan kesehatan berdampak pada meningkatnya keikutsertaannya. Lubis (2016) dalam penelitiannya menunjukkan ada pengaruh penghindaran risiko, harga asuransi dan pendapatan masyarakat terhadap kepesertaannya dalam program jaminan kesehatan. Laila, dkk (2020) mengatakan bahwa Besarnya penghasilan yang diterima oleh seseorang akan mempengaruhi kemauan seseorang untuk mendaftar menjadi peserta asuransi kesehatan. Masyarakat yang mempunyai pendapatan yang lebih lebih tinggi, memutuskan menjadi peserta JKN karena mereka yang mempunyai penghasilan yang cukup akan mempertimbangkan dengan baik untuk mengikuti JKN.

Pengaruh Kemampuan Membayar Iuran Terhadap Pengaktifan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Tabel 4. Pengaruh kemampuan membayar iuran terhadap pengaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Kemampuan membayar iuran	Aktif Kembali		Peserta Baru		Jumlah		CI 95%
	N	%	N	%	N	%	
Mampu	42	51,9	39	48,1	81	100	L=0,901
Tidak mampu	48	40,3	71	59,7	119	100	U=2,815
Jumlah	90	45,0	110	55,0	200	100	

Uji *Chi – Square* diperoleh nilai P sebesar $0.008 < 0.05$ maka dapat disimpulkan adanya

pengaruh yang signifikan antara kemampuan membayar iuran terhadap pengaktifan kepesertaan

Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Kemampuan membayar (*Ability to Pay*) merupakan kemampuan seseorang untuk membayar jasa pelayanan yang diterimanya berdasarkan penghasilan yang dianggap ideal. Dalam bidang kesehatan, konsep ATP digunakan untuk mengetahui kemampuan individu untuk membayar suatu program atau pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan masyarakat untuk membeli produk tersebut. ATP merupakan faktor penting dalam mengembangkan system jaminan kesehatan dan menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan besarnya iuran atau premi (Russel, 1996).

Faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap asuransi kesehatan. Laila, dkk (2020) mengatakan bahwa Besarnya penghasilan yang

diterima oleh seseorang akan mempengaruhi kemauan seseorang untuk mendaftar menjadi peserta asuransi kesehatan. Masyarakat yang mempunyai pendapatan yang lebih lebih tinggi, memutuskan menjadi peserta JKN karena mereka yang mempunyai penghasilan yang cukup akan mempertimbangkan dengan baik untuk mengikuti JKN. Sastradimulya, dkk (2014) mengatakan kemampuan membayar berdampak pada meningkatnya keikutsertaannya. Lubis (2016) dalam penelitiannya menunjukkan ada pengaruh penghindaran risiko, harga asuransi dan pendapatan masyarakat terhadap kepesertaannya dalam program jaminan kesehatan.

Pengaruh Kemauan Membayar Iuran Terhadap Pengaktifan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Tabel 5. Pengaruh kemauan membayar iuran terhadap pengaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Kemauan membayar iuran	Aktif Kembali		Peserta Baru		Jumlah		CI 95%
	N	%	N	%	N	%	
Bersedia	43	51,2	41	48,8	84	100	L=0,874 U=2,712
Tidak bersedia	47	40,5	69	59,5	116	100	
Jumlah	90	45,0	110	55,0	200	100	

Hasil uji statistik di peroleh nilai P sebesar $0.034 < 0.05$ maka dapat disimpulkan adanya pengaruh yang signifikan antara kemauan membayar iuran terhadap pengaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. *Willingness to pay* (WTP) atau kemauan/keinginan untuk membayar dapat diartikan sebagai sejumlah yang akan dibayarkan seorang konsumen untuk memperoleh suatu barang atau jasa. *Willingness to pay* (WTP), yaitu besarnya dana yang mau dibayarkan keluarga untuk kesehatan. Data pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan didalam data susenas dapat digunakan sebagai proksi terhadap WTP. Faktor-faktor yang mempengaruhi WTP, yaitu pendapatan, pengetahuan mengenai tarif dan persepsi serta penilaian tentang pelayanan yang diterima pasien (Gafni, 1991 sitasi dari Riyanti, 2011).

Faktor utama yang mempengaruhi kemauan membayar premi jaminan kesehatan Krama Badung Sehat (KBS) adalah pendapatan dan pengeluaran rata-rata per bulan. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Badung sudah memiliki pendapatan lebih dari UMR namun dalam pengeluarannya masyarakat lebih banyak mengeluarkan pendapatan untuk kebutuhan pangan. Kurangnya pengeluaran untuk kesehatan dipengaruhi oleh pendidikan, status perkawinan,

riwayat masalah membayar tagihan medis, kesadaran akan dasar-dasar asuransi kesehatan. Whidiastuti (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemauan masyarakat membayar BPJS secara mandiri dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, keyakinan tentang JKN, dukungan keluarga, dan dukungan tokoh masyarakat. Laila, dkk (2020) mengatakan bahwa Besarnya penghasilan yang diterima oleh seseorang akan mempengaruhi kemauan seseorang untuk mendaftar menjadi peserta asuransi kesehatan.

Whidiastuti (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemauan masyarakat membayar BPJS secara mandiri dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, keyakinan tentang JKN, dukungan keluarga, dan dukungan tokoh masyarakat. Laila, dkk (2020) mengatakan bahwa Besarnya penghasilan yang diterima oleh seseorang akan mempengaruhi kemauan seseorang untuk mendaftar menjadi peserta asuransi kesehatan. Masyarakat yang mempunyai pendapatan yang lebih lebih tinggi, memutuskan menjadi peserta JKN karena mereka yang mempunyai penghasilan yang cukup akan mempertimbangkan dengan baik untuk mengikuti JKN. Lubis (2016) dalam penelitiannya menunjukkan ada pengaruh penghindaran risiko, harga asuransi dan pendapatan masyarakat terhadap kepesertaannya dalam program jaminan kesehatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ada pengaruh signifikan antara pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, pendapatan, peraturan syarat kepesertaan, kemampuan membayar, dan kemauan membayar terhadap pengaktifan kepesertaan jaminan kesehatan Krama Badung Sehat di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.

Petugas kesehatan memberikan penyuluhan kepada responden tentang pentingnya mengaktifkan kembali KBS disamping itu dinas kesehatan maupun dinas pendidikan memberikan bantuan beasiswa kepada masyarakat yang memiliki pendidikan rendah agar pendidikan masyarakat badung menjadi lebih tinggi dan Dinas Kesehatan memberikan solusi didalam mengatasi permasalahan yang terjadi seperti memberikan toleransi kepada krama Badung serta menambah anggaran mengenai bebas biaya jaminan kesehatan bagi Krama Badung

DAFTAR PUSTAKA

- Notoatmodjo (2014) *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan Edisi Revisi 2014*. Jakarta: Rineka Cipta
- Notoatmodjo (2018) *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nursalam (2011) *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika
- Reksoprayitno, Soediyono (2009) *Ekonomi Makro*. Adan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM Dinkes
- Kabupaten Badung (2019) *Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2018*. Mangupura: Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.

Dinkes Kabupaten Badung (2019) *Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2020*. Mangupura: Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.

Makalah dalam Internet

Pangestika Viona Febya, Jati Sutopo Patria dan Striatmi Ayun (2017) faktor-faktor yang berhubungan dengan kepesertaan sektor informal dalam BPJS kesehatan mandiri di kelurahan poncol, kecamatan pekalongan timur, kota pekalongan. *Jurnal kesehatan masyarakat*. Volume 5. Nomor 3.

Rhoza Novia, Mahwati Yeni dan Tri Nurhayati Asih (2016) faktor-faktor yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) di kecamatan babakan ciparay kota bandung tahun 2016. *jurnal ilmiah kesehatan*. Vol 8. No 2.

Russel Steven (1996) *Ability to Pay for Health Care: Concepts and Evidence Health Policy and Planning*.

Sastradimulya F, Nurhayati E, Susanti Y. (2014). Hubungan Tingkat Pengetahuan Pasien tentang Jaminan Kesehatan Nasional dengan Status Kepesertaan BPJS. Bandung: Universitas Islam Bandung.

Sugianto (2019) *Dampak Program Krama Badung Sehat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Badung*. Badung: Badan Peneliti dan Pengembangan Kabupaten Badung

Whidiastuti, Ida Ayu. (2015). Hubungan Faktor Sosiodemografi, Persepsi, dan Sosialisasi dengan Kepesertaan Pasien Rawat Jalan dalam Program JKN secara Mandiri di Puskesmas I Denpasar Timur.